



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAMUN 1989
TENTANG
PBRUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1978

PRESIDEN REPUDLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan, pengendalian, dan perencanaan serta memperlancar pelaksanaan pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, dipandang perlu untuk mengubah susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Induatri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978;
3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1964 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse;
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDOPNESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1978.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) Susunan Otorita Pengembanran Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Kepala Satuan Pelaksana;
 - d. Kepala Satuan Pengawasan Intern;
 - e. Asisten Ketua.
2. Menyisipkan pasal baru dalam BAB IV dan menjadikannya Pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

- (1) Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawasan Intern adalah jabatan setingkat eselon IIa.
 - (2) Asisten Ketua adalah jabatan setingkat eselon IIb.
3. Mengubah ketentuan Pasal 8 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 - (2) Ketua dan Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 - (3) Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawasn Intern, Asiaten Ketua dan jabatan lain di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan dlberhentikan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
 - (4) Anggota Tim Asistensi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas usul Menteri yang bersangkutan."
4. Mengubah ketentuan Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai bertkut:

"Pasal 9

- (1) Perincian tugas dan tata kerja Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam.
- (2) Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang

pendayagunaan aparatur negara."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO